

---

## KETERKAITAN SOSIAL DAN POLITIK TERHADAP EFISIENSI PARIWISATA DI ASEAN

Alifah Rokhmah Idialis<sup>1</sup>; Trischa Relandra Putra<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo  
Madura

<sup>2</sup>Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura  
Email: [trischa.relanda1922@gmail.com](mailto:trischa.relanda1922@gmail.com))

### **ABSTRACT**

*This research attempts to explore further whether there is significant involvement that participates in influencing the development and progress of the tourism sector. The selection of socio-political aspects in this study is based on the findings of previous studies that state that there is involvement of social and political stability in creating economic growth and stability, which is one of the variables that drive economic growth of the tourism sector.*

*Departing from the findings and theories mentioned above, this study tries to identify, detect and estimate whether there is significant socio-political involvement and influence in creating tourism efficiency, especially in ASEAN? Efficiency measurement uses the Stochastic Frontier Analysis (SFA) method.*

*Result estimation show that entirety number of independent variables affect dependent variables. This proves that there is a significant impact of social and political variables on tourism, especially the number of foreign tourist visits in ASEAN. The influence of social and political aspects on the arrival of foreign tourists to ASEAN proves that social and political roles are important in today's era. Efficiency values indicate very high inefficiencies. This proves that tourism inefficiencies are also heavily influenced by political and social aspects in the ASEAN region. The influence of political and legal stability will affect the interests and visits of foreign tourists, as they consider the safety, comfort, and good legal service while in their tourist destinations.*

*Keywords: efficiency, tourism, socio-politics, ASEAN, , Stochastic Frontier Analysis (SFA).*

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini mencoba menggali lebih jauh adakah keterlibatan yang signifikan yang turut serta dalam mempengaruhi perkembangan dan kemajuan sektor pariwisata. Pemilihan aspek sosial politik di dalam penelitian ini berdasarkan beberapa hasil temuan penelitian-penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa ada keterlibatan stabilitas sosial dan politik dalam menciptakan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, dimana salah satu variabel yang mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata.*

*Berangkat dari hasil temuan dan teori telah disebutkan di atas, maka penelitian ini mencoba mengidentifikasi, mendeteksi dan mengestimasi adakah keterlibatan dan pengaruh signifikan sosial politik dalam menciptakan efisiensi pariwisata khususnya di ASEAN?. Pengukuran efisiensi menggunakan metode Stochastic Frontier Analysis (SFA).*

*Hasil estimasi menunjukkan bahwa ebagian besar variabel independen*

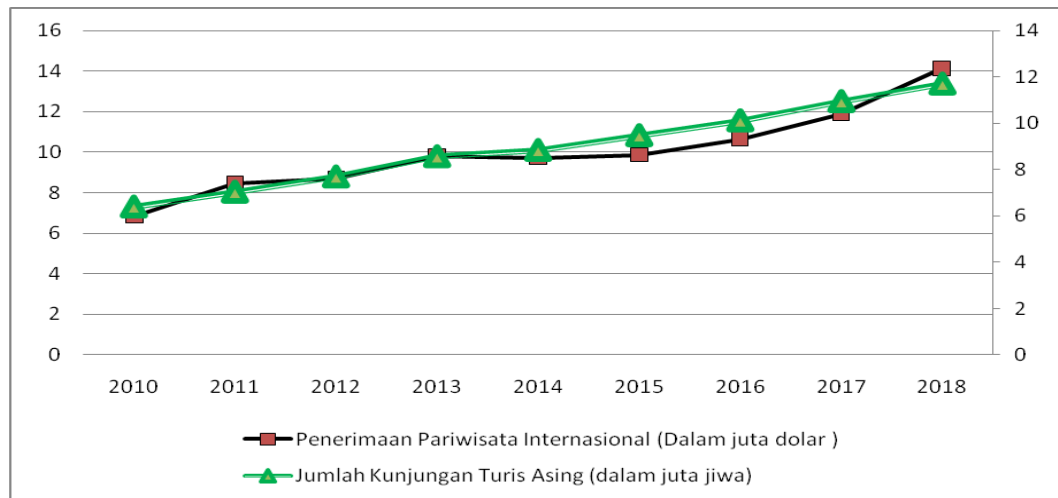
berpengaruh terhadap variabel dependen. Hal ini membuktikan bahwa ada dampak yang signifikan dari variabel sosial dan politik terhadap pariwisata khususnya jumlah kunjungan wisatawan asing di ASEAN. Pengaruh aspek sosial dan politik terhadap kedatangan turis asing ke ASEAN membuktikan bahwa peranan sosial dan politik menjadi penting di era sekarang ini. Nilai efisiensi menunjukkan inefisiensi yang sangat tinggi. Hal ini membuktikan bahwa inefisiensi pariwisata juga banyak dipengaruhi oleh aspek politik dan sosial di kawasan ASEAN. Pengaruh stabilitas politik dan hukum akan mempengaruhi ketertarikan dan kunjungan wisatawan asing, karena mereka mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, dan pelayanan hukum yang baik selama berada di daerah tujuan wisata mereka.

*Kata Kunci: efisiensi, pariwisata, sosial politik, ASEAN, Stochastic Frontier Analysis (SFA).*

## **PENDAHULUAN**

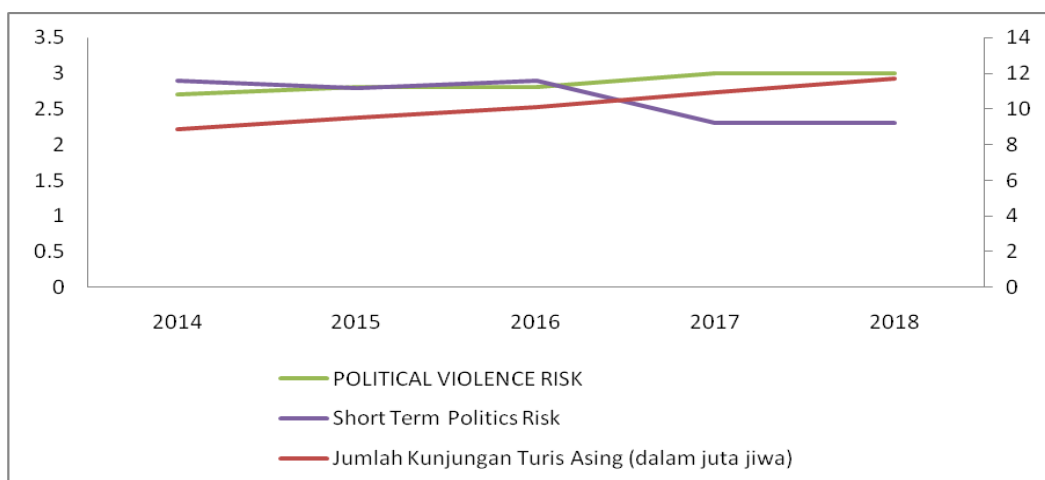
Perkembangan sektor pariwisata pada sepuluh tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan terutama di wilayah ASEAN. Karakteristik wilayah ASEAN yang memiliki budaya dan destinasi wisata beragam serta memiliki iklim tropis mempengaruhi minat turis-turis domestik maupun mancanegara untuk berkunjung ke ASEAN. Lima negara ASEAN yang memiliki kunjungan wisatawan asing terbanyak adalah Thailand, Singapura, Malaysia, Indonesia, dan Vietnam. Vietnam menjadi negara baru tujuan destinasi wisata turis mancanegara. Negara ini tercatat memiliki kemajuan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi rata-rata sebesar 6%.

Berdasarkan catatan dari UNWTO (*United Nations World Tourism Organizations*) jumlah kunjungan wisatawan asing tertinggi di ASEAN adalah Thailand sebesar 37,277 juta jiwa pada tahun 2018 naik sebesar 8,2% dibandingkan tahun 2017 sebesar 35,381 juta jiwa. Urutan kedua ditempati oleh Malaysia dengan jumlah kunjungan wisatawan asing tahun 2018 sebesar 25,832 juta jiwa atau turun sebesar 0,45% dibandingkan tahun 2017 sebesar 25,948. Posisi ketiga ditempati oleh Vietnam dengan jumlah kunjungan wisatawan asing sebesar 15,498 juta jiwa yang mengalami kenaikan sebesar 19,93% dibandingkan tahun 2017 sebesar 12,922 juta jiwa. Posisi keempat ditempati oleh Singapura dengan jumlah wisatawan asing tahun 2018 14,673 juta jiwa atau naik sebesar 5,52% dibandingkan tahun 2017 sebesar 13,906 juta jiwa. Terakhir Indonesia mengalami kenaikan jumlah kunjungan wisatawan asing sebesar 3,46% dari 12,948 juta jiwa tahun 2017 menjadi 13,396 juta jiwa di tahun 2018. Untuk melihat perkembangan rata-rata jumlah wisatawan asing dan rata-rata penerimaan pariwisata internasional disajikan pada Gambar 1.



**Gambar 1**  
**Grafik Perkembangan Kunjungan Wisatawan Asing dan Penerimaan Pariwisata Internasional di ASEAN 2010-2018, data diolah**

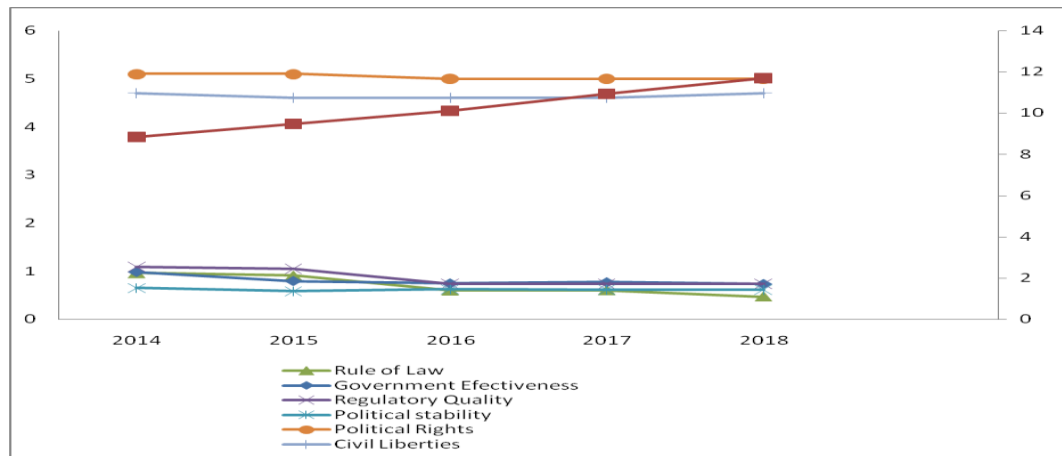
Berdasarkan Gambar di atas diketahui bahwa ketika jumlah wisatawan asing meningkat secara signifikan mempengaruhi kenaikan pendapatan pariwisata. Perubahan sektor pariwisata dari beberapa penelitian selalu dihubungkan dengan variabel ekonomi. Namun ada variabel non ekonomi yang turut serta mempengaruhi stabilitas dan perubahan sektor pariwisata misalnya kondisi sosial dan politik. Kondisi sosial dan politik sebenarnya menjadi salah satu pertimbangan turis mancanegara untuk berkunjung ke suatu negara tujuan wisata. Apabila kondisi sosial politik dari suatu negara tujuan wisata memiliki kecenderungan stabil maka akan mendatangkan lebih banyak turis mancanegara, misalnya jika tindak kriminalitas di suatu negara cenderung rendah maka turis mancanegara akan merasa aman di negara tujuan wisata. Akan tetapi, apabila tindak kriminalitas tinggi maka turis mancanegara akan mengurangi berkunjung ke negara tersebut. Contoh lain pengaruh kondisi sosial politik terhadap pariwisata, jika penegakan hukum di suatu negara tinggi atau berkeadilan, maka wisatawan akan meningkatkan tingkat kepercayaan turis mancanegara kepada daerah tujuan wisata, namun jika penegakan hukum di suatu negara tujuan wisata rendah maka tingkat kepercayaan wisatawan mancanegara kepada daerah tujuan wisata pasti rendah. Untuk melihat pengaruh sosial politik terhadap pariwisata, maka akan disajikan beberapa gambar. Gambar 2 yaitu grafik yang memperlihatkan pengaruh politik seperti resiko negara/*country risk* (yang diwakili oleh variabel: *political violence* dan *short term political*) terhadap jumlah kunjungan wisatawan asing.



**Gambar 2**

**Grafik Perkembangan Resiko Negara terhadap Kunjungan Wisatawan Asing di ASEAN 2014-2018, data diolah**

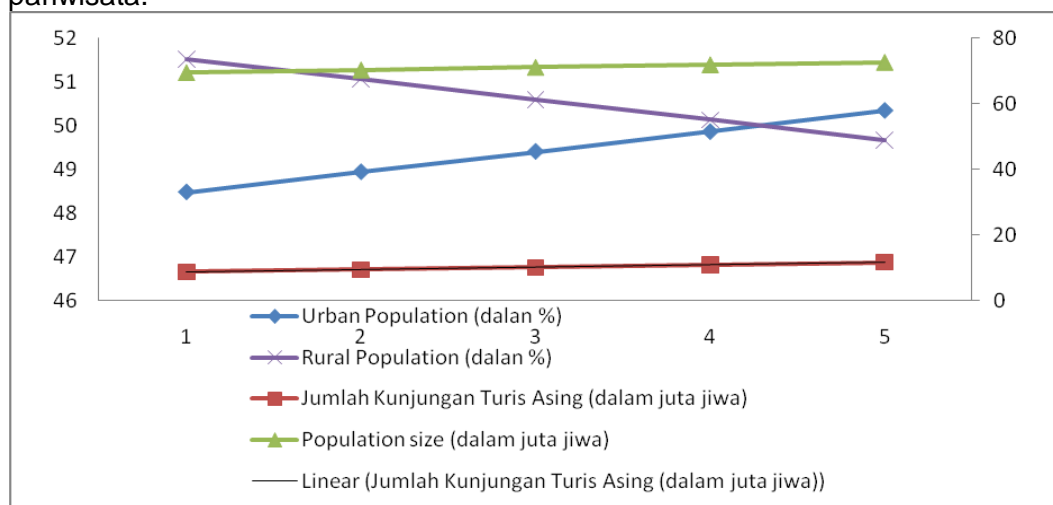
Grafik ini menunjukkan arah pergerakan yang cenderung positif. Ketika resiko negara rendah jumlah kunjungan wisatawan asing cenderung naik. Indeks untuk resiko negara adalah 7 untuk resiko tertinggi dan 1 untuk resiko terendah. Rata-rata resiko negara di ASEAN sebesar 2 sampai 3. Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara di ASEAN memiliki kecenderungan resiko negara yang rendah, sehingga memiliki kemampuan mendorong pariwisata. Untuk Gambar 3 memperlihatkan keterkaitan *Governance* dan kelembagaan yang dimasukkan dalam kategori politik (diwakili oleh variabel *Rule of law*, *Government effectiveness*, *Political stability*, *Political rights*, *Civil liberties*, dan *Regulatory quality*) terhadap pariwisata. Berdasarkan Grafik dibawah ini diketahui bahwa ketika kondisi *governance* dan kelembagaan suatu negara membaik, maka akan meningkatkan jumlah wisatawan asing. Hal ini membuktikan ada keterkaitan antara aspek sosial politik terhadap perubahan pariwisata di ASEAN. Menurut [www.theglobaleconomy.com](http://www.theglobaleconomy.com) *Rule of law*, *Government effectiveness*, *Political stability*, dan *Regulatory quality* memiliki kondisi baik jika bernilai 2,5 dan lemah jika -2,5. Namun, *Political rights* dan *Civil liberties* dalam kondisi baik apabila bernilai 1 dan kondisi kurang baik bernilai 7. Berdasarkan gambar di bawah tersebut *Rule of law*, *Government effectiveness*, *Political stability*, dan *Regulatory quality* memiliki kecenderungan bernilai positif dan berada pada nilai indeks yang stabil, sedangkan untuk *Political rights* dan *Civil liberties* juga bernilai stabil pada kisaran nilai 5. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi *governance* dan kelembagaan di negara-negara ASEAN memiliki kondisi yang cukup stabil, sehingga menjadi pertimbangan bagi turis asing untuk berkunjung ke ASEAN.



**Gambar 3**

**Grafik Perkembangan Governance dan Kelembagaan terhadap Kunjungan Wisatawan Asing di ASEAN 2014-2018, data diolah**

Gambar selanjutnya adalah Gambar 4 yang akan memperlihatkan grafik pergerakan yang menggambarkan faktor sosial yaitu demografi yang diwakili oleh *population size*, *urban population*, dan *rural population* dan *human development index* atau HDI terhadap pariwisata. Di dalam gambar ini akan melihat kecenderungan ada atau tidaknya pengaruh demografi dan HDI terhadap pariwisata.



**Gambar 4**

**Grafik Perkembangan Demografi terhadap Kunjungan Wisatawan Asing di ASEAN 2014-2018, data diolah**

Pada gambar di atas diketahui bahwa ketika *population size* dan persentase *urban population* meningkat, tetapi persentase *rural population* menurun berdampak pada jumlah kunjungan wisatawan asing juga meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah populasi dan populasi urban berdampak kepada sektor pariwisata baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan hasil gambaran data dan grafik serta pemaparan di atas, maka di dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi adakah keterkaitan aspek sosial politik terhadap terciptanya efisiensi sektor pariwisata di

ASEAN. Dengan menggunakan variabel sosial politik dan pariwisata yang terdiri dari *Rule of law*, *Government effectiveness*, *Political stability*, *Political rights*, *Civil liberties*, dan *Regulatory quality*, jumlah kunjungan wisatawan asing *population size*, *urban population*, dan *rural population* dari masing-masing negara ASEAN, maka penelitian ini akan diidentifikasi, dianalisis, diuji, dan diestimasi lebih jauh keterkaitan aspek sosial dan politik terhadap efisiensi pariwisata dengan menggunakan pendekatan dan model efisiensi ekonomi yaitu model *Stochastic Frontier Analysis* (SFA).

## STUDI LITERATUR

### Teori Pariwisata

Secara umum definisi pariwisata adalah seseorang yang melakukan perjalanan ke tempat lain dengan tujuan tertentu. Menurut *United Nation World Tourism Organization* (UNWTO) pariwisata adalah suatu kegiatan perjalanan dan menetap yang dilakukan oleh seseorang di tempat lain yang bukan merupakan lingkungan tempat tinggalnya. Kegiatan wisata ini memiliki tujuan antara lain; untuk bersenang-senang, bisnis, atau tujuan lainnya. Pada umumnya kegiatan wisata dilakukan untuk berlibur dan mengisi waktu senggang. Kegiatan ini biasanya dilakukan dalam tempo jangka pendek. Sementara itu, turis mancanegara didefinisikan sebagai pengunjung non-penduduk yang tinggal paling sedikitnya satu malam baik dilakukan secara kolektif atau pribadi di negara tujuan pariwisatanya.

UNWTO membagi pariwisata menjadi dua bagian, antara lain:

1. Pariwisata domestik (*inbound /domestic tourism*)

Pariwisata domestik adalah aktivitas atau kegiatan wisata yang dilakukan oleh penduduk lokal atau domestik.

2. Pariwisata luar negeri (*outbond tourism*)

Pariwisata luar negeri adalah aktivitas atau kegiatan wisata yang dilakukan oleh turis mancanegara.

Sama halnya dengan definisi oleh UNWTO, definisi menurut Badan Pusat Statistik pariwisata adalah setiap orang yang melakukan perjalanan ke suatu negara di luar negara tempat tinggalnya dengan tempo waktu kurang dari satu tahun. Kegiatan wisata ini didorong oleh suatu tujuan utama yaitu: bisnis, berlibur, atau tujuan pribadi lainnya, dan atau untuk bekerja dengan penduduk negara yang dikunjungi. BPS membagi definisi turis mancanegara menjadi dua kategori, antara lain

- a. Wisatawan (*tourist*)

Wisatawan adalah setiap pengunjung yang tinggal paling sedikitnya 24 jam, tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan di tempat yang dikunjungi. Wisatawan memiliki tujuan kunjungan antara lain; berlibur, rekreasi, mengunjungi teman atau keluarga, belajar atau pelatihan, kesehatan, olah raga, keagamaan, belanja, transit, dan lain-lain. Tujuan lain dari wisata yang dilakukan oleh wisatawan adalah untuk bisnis dan profesional meliputi; menghadiri pertemuan, konferensi atau kongres, pameran dagang, konser, pertunjukan, dan lain-lain.

- b. Pelancong (*Excursionist*)

Pelancong memiliki definisi adalah setiap pengunjung yang tinggal kurang dari dua puluh empat jam di tempat yang dikunjungi (termasuk *cruise passenger* yaitu setiap pengunjung yang tiba di suatu negara dengan kapal atau kereta

---

api, dimana mereka tidak menginap di akomodasi yang tersedia di negara tersebut).

### **Hubungan Sosial Politik dan Pariwisata**

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa ada keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dari factor social politik terhadap pariwisata di ASEAN. Asumsi ini kemudian telah dibuktikan oleh berbagai penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa ada keterkaitan aspek sosial politik terhadap pariwisata atau sebaliknya ada keterkaitan pariwisata terhadap.

#### **a. Governance (tata kelola) terhadap Pariwisata**

Pentingnya *governance* dalam sebuah Negara menunjukkan adanya transparansi dan tata kelola yang baik. *Governance* yang terimplementasi dengan baik dan benar dapat menekan angka KKN. Fungsi control dan manajerial yang baik dan professional mendatangkan dampak positif bagi kemajuan sebuah Negara dari berbagai sector tak terkecuali dari sector pariwisata. *Governance* mampu meningkatkan kepercayaan publik domestic dan mancanegara terhadap Negara tersebut. Dampak yang dapat dirasakan dengan penerapan *governance* yang baik, benar dan professional di bidang pariwisata yaitu mampu mendatangkan jumlah wisatawan mancanegara lebih banyak, sehingga akan berdampak kepada pendapatan Negara yang meningkat. Hal ini dibuktikan oleh penelitian Qin *et al.* (2015) menyatakan bahwa keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan pariwisata berdampak pada perbaikan sektor pariwisata terutama infrastruktur. Peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata sebagai pembuat keputusan, pialang kekuasaan, dan pemangku kepentingan mendorong kemajuan di sector pariwisata. Zhang *et al.* (1999) menemukan bahwa pengelolaan pariwisata yang baik dan benar hendaknya diserahkan kepada pemerintah, karena sector swasta di Negara berkembang masih belum mumpuni dalam mengelola pariwisata. Jenkins dan Henry (1982), pengelolaan yang baik pada pariwisata oleh pemerintah akan mendatangkan investasi bagi sector ini. Negara-negara yang melibatkan peran serta pemerintah dalam pengelolaan sector pariwisata menunjukkan perkembangan sector ini yang membaik (Kubickova dan Li, 2016). Hasil penelitian lain dari Shim dan Lee (2015) menunjukkan bahwa ada persepsi positif dan negatif yang muncul dari masyarakat terhadap pengelolaan pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah. Persepsi positif muncul apabila keterlibatan pemerintah dalam pengembangan pariwisata diperlukan untuk mengembangkan masyarakat secara efisien, cara terbaik untuk mendapatkan dukungan penduduk adalah dengan memaksimalkan dampak keterlibatan pemerintah yang positif. Namun persepsi dampak keterlibatan pemerintah yang negatif memiliki sedikit pengaruh terhadap kepuasan masyarakat dengan pengembangan pariwisata yang digerakkan pemerintah. Selain aspek social politik yang mempengaruhi sector pariwisata, aspek financial menjadi salah satu pendukung utama dalam pengembangan sector pariwisata (Xiang *et al.*, 2013).

Pentingnya tataola pariwisata untuk daerah konservasi dapat meningkatkan efektivitas sektor pariwisata (Jones, 2019). Tatakelola dari sektor pariwisata yang kurang baik menguatkan bahwa terdapat hubungan non-linier antara korupsi dan permintaan pariwisata (Lv dan Zu, 2016). Tingginya persepsi korupsi disuatu negara menurunkan daya saing pariwisata negara tersebut, karena akan mengurangi FDI yang masuk ke industry pariwisata (Ruiz et al., 2020). Khan et al. (2019) menunjukkan indeks kinerja logistik berdampak positif pada permintaan pariwisata internasional, namun keuangan dan regulasi memiliki dampak yang berbeda pada pariwisata internasional. Cao (2015) mengungkapkan bahwa kerangka kebijakan dan peraturan yang baik sangat penting dalam perencanaan untuk keberlanjutan pengembangan pariwisata.

Kemajuan sektor pariwisata tidak luput dari kebijakan dan regulasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan sektor pariwisata tujuan agar ekosistem pariwisata tetap terjaga (Cantallops, 2011).

#### **b. Kelembagaan dan Resiko Negara terhadap Pariwisata**

Selain peran penting *governance* dalam pengembangan pariwisata, keterlibatan institusi atau kelembagaan juga penting. Institusi sebagai badan atau organisasi pembuat keputusan menjadikan factor kelembagaan menjadi salah satu factor yang dapat mempengaruhi pengembangan dan kemajuan sektor pariwisata. Pemerintah sebagai institusi resmi yang membuat, memutuskan, dan menjalankan Undang-undang sesuai konstitusi yang berlaku hendaknya tetap mengacu dan mempertimbangkan kebebasan sipil dalam pengembangan pariwisata (King dan Gatchet, 2017). Kebebasan sipil ini dimaksudkan untuk mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal pada pariwisata setempat.

Perlunya ladasan hukum pada sektor pariwisata untuk menghindari kegagalan. Kegagalan dapat membuat perubahan yang tidak hanya mengancam dampak negatif pada perdagangan dunia, tetapi juga industri pariwisata (Kubickova dan Li, 2010). Perlunya akses kebebasan berpolitik bagi wisatawan untuk menghindari rasisme, xenofobia, dan kontrol perbatasan yang terbatas (Bianchi et al., 2020). Sementara itu, menurut Fieldinga and Shortland (2017) menemukan beberapa bukti bahwa:

1. Wisatawan bereaksi negatif terhadap serangan yang ditargetkan pada industri pariwisata yang mengakibatkan hilangnya nyawa atau cedera. Ada juga beberapa bukti bahwa turis Eropa bereaksi sangat kuat terhadap peristiwa berskala besar (yang dipublikasikan dengan baik).
2. Para turis Eropa bereaksi jauh sensitif terhadap kekerasan daripada turis Amerika

Penelitian Caoa (2015) menyatakan bahwa pengaturan kelembagaan yang lebih rasional dan efektif diperlukan, dengan fungsi dan tanggung jawab yang jelas untuk pemerintah di berbagai tingkat, sehingga sektor pariwisata dapat berkembang dengan baik dan mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi. Chih-Hsing Liu & Yung-Chuan Huang. Choi et al., (2020) ketidakstabilan politik

---



mempengaruhi kunjungan wisatawan asing. Ketidak stabilan politik mendatangkan ketakutan besar bagi calon wisatawan calon (Radu, 2002). Adanya ketidakstabilan politik yaitu insiden terorisme di negara asal turis dapat memengaruhi persepsi risiko mereka dan karenanya secara negatif memengaruhi niat untuk bepergian ke luar negeri (Adam, 2015; Deng dan Ritchie, 2018; Teitler-Regev; Shahrabani dan Goziker, 2014). Hasil lain dari penelitian yang dilakukan oleh Díaz *et al.*, (2017) yang dilakukan di Spanyol dan Rusia menunjukkan bahwa keterbukaan visa serta ketidakstabilan politik dan kerusuhan sipil yang terjadi di Rusia menyebabkan perununan wisatawan ke Rusia dan menarik para wisatawan tersebut ke Spanyol. Hasilnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat pengangguran di Spanyol. Hasil lain dari penelitian ini adalah konfrontasi politik internasional mengakibatkan kerugian bagi permintaan pariwisata Rusia ke Spanyol.

Menurut Clanchy (2020) kebijakan pemerintah mengenai persewaan perumahan dalam jangka pendek mendorong adanya pertumbuhan ekonomi. Penemuan Abraham *et al.* (2020) membuktikan bahwa politik permusuhan lebih cenderung membawa pengaruh jangka panjang pada perilaku pariwisata. Abraham dan Poria (2019) mengungkapkan bahwa kondisi politik suatu negara mempengaruhi perilaku wisatawan dalam mempertimbangkan tempat kunjungan wisatanya. Athari *et al.* (2020) membuktikan bahwa faktor politik keamanan menentukan memberikan dampak signifikan terhadap sektor pariwisata. Steiner (2010) menunjukkan bahwa *foreign direct investment* pariwisata berhubungan dengan kondisi resiko politik, kekerasan dan kerusuhan politik. Zou dan Meng (2019) menunjukkan bahwa faktor keselamatan wisatawan menjadi hal penting bagi sektor pariwisata. Faktor kekerasan rasial menjadi permasalahan yang perlu dilakukan tindakan proaktif untuk mengurangi kekerasan rasial (Duffy *et al.*, 2018). Transisi politik dari konservatif menjadi terbuka di Iran berpengaruh secara signifikan terhadap sektor pariwisata (seyfi dan Hall, 2020).

Menurut Wang *et al.*(2018) menyatakan bahwa penerapan hukum dalam pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan. Ma *et al.* (2015) mengungkapkan perlunya hukum pariwisata dengan tujuan pengaturan malpraktek di industry pariwisata. Menurut Demin dan Gozgor (2018) tingginya kebebasan pers turut serta meningkatkan promosi pariwisata. Berdasarkan hasil temuan Henderson (2020) menunjukkan bagaimana ideologi dan peristiwa politik mempengaruhi kedatangan wisatawan. Kožić *et al* (2020) menemukan bahwa kondisi tingkat kebebasan politik memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan pariwisata. Tan *et al.* (2017) menunjukkan bahwa hukum dapat memberikan perlindungan hak-hak turis sebagai konsumen dari kemungkinan pelanggaran perusahaan pariwisata.

### **c. Kependudukan terhadap Pariwisata**

Peran penduduk dalam mensukseskan sebuah program sangat besar dalam hal ini program-program pengembangan pariwisata dan sebaliknya ketika program pengembangan pariwisata mengalami kemajuan juga mempengaruhi

masalah kependudukan baik positif maupun negatif. Beberapa penelitian menunjukkan ada dampak positif yang ditimbulkan oleh Pembangunan industri pariwisata yang biasanya meningkatkan jumlah penduduk setempat (Prмони, 1993). Ada proses migrasi keluar dari daerah yang sektor wisatanya kurang berkembang menuju ke daerah yang sektor pariwisatanya mengalami kemajuan, karena peningkatan penduduk ini dipacu oleh daya tarik lapangan pekerjaan baru yang tersedia (Pearce, 1983:51). Hasil ini diperkuat juga oleh Pralina (2012) yang menyatakan bahwa kehidupan perekonomian di tempat yang menjadi destinasi wisata memberikan kemakmuran dan kesejahteraan serta meningkatkan pembangunan manusia bagi penduduk setempat dimana pariwisata tersebut dikembangkan. Bahwa peran masyarakat dalam membangun pariwisata sangat penting khususnya membangun industri pariwisata dengan tahap dari bawah ke atas (Keyim, 2016). Menurut Daniel (2015) pariwisata pedesaan juga memiliki implikasi besar dalam pembangunan ekonomi, sosial dan budaya desa

## METODOLOGI PENELITIAN

### Data

Pada penelitian ini menggunakan data panel yang terdiri dari data runtun waktu dan data *cross section*. Data panel ini diperoleh dari data sekunder yang terdiri data runtun waktu sosial politik dan pariwisata dari negara-negara ASEAN. Untuk data sosial politik terdiri dari data *governance*, institusi/kelembagaan, resiko negara, dan kependudukan. Keseluruhan data sosial politik tersebut diambil dari negara-negara ASEAN yang mana sebagai subjek penelitian. Baik data sosial politik maupun pariwisata bersifat data runtun waktu, sedangkan data *cross section* adalah negara-negara ASEAN. Sementara itu, untuk data pariwisata di dalam penelitian ini menggunakan jumlah kunjungan wisatawan (*International Tourist Arrivals*) dari negara-negara ASEAN.

Periode observasi di dalam penelitian ini yaitu tahun 2007 sampai 2020. Sementara itu, sumber data dari penelitian ini diperoleh dari: Bank Dunia, UNWTO (*United Nations World Tourism Organization*), <https://www.theglobaleconomy.com>. Mengingat di dalam penelitian ini ingin mengidentifikasi dan mendeteksi keterkaitan variable sosial politik terhadap efisiensi pariwisata, maka penelitian ini akan diuji dan diestimasi secara statistik dengan menggunakan metode SFA (*stochastic frontier analysis*). Pada Tabel 1 berikut diperlihatkan detail dari variabel-variabel penelitian.

**TABEL 1**  
**Rincian Variabel Penelitian**

No.	Variabel	Akronim	Sumber	Frekuensi
1	Jumlah kunjungan wisatawan ( <i>International Tourist Arrivals</i> )	ITA	UNWTO ( <i>United Nations World Tourism Organization</i> )	Tahunan: 2007 sampai 2020

---

2	<i>Rule of Law</i>	RL	<a href="https://www.theglobaleconomy.com">https://www.theglobaleconomy.com</a>	Tahunan: 2007 sampai 2020
3	<i>Government Effectiveness</i>	GE	<a href="https://www.theglobaleconomy.com">https://www.theglobaleconomy.com</a>	Tahunan: 2007 sampai 2020
4	<i>Political Stability</i>	PS	<a href="https://www.theglobaleconomy.com">https://www.theglobaleconomy.com</a>	Tahunan: 2007 sampai 2020
5	<i>Political Rights</i>	PR	<a href="https://www.theglobaleconomy.com">https://www.theglobaleconomy.com</a>	Tahunan: 2007 sampai 2020
6	<i>Civil Liberties</i>	CL	<a href="https://www.theglobaleconomy.com">https://www.theglobaleconomy.com</a>	Tahunan: 2007 sampai 2020
7	<i>Regulatory Quality</i>	RQ	<a href="https://www.theglobaleconomy.com">https://www.theglobaleconomy.com</a>	Tahunan: 2007 sampai 2020
8	<i>Short-Term Political Risk</i>	SPR	<a href="https://www.theglobaleconomy.com">https://www.theglobaleconomy.com</a>	Tahunan: 2007 sampai 2020
9	<i>Political Violence Risk</i>	PVR	<a href="https://www.theglobaleconomy.com">https://www.theglobaleconomy.com</a>	Tahunan: 2007 sampai 2020
10	<i>Population Size</i>	PZ	<a href="https://www.theglobaleconomy.com">https://www.theglobaleconomy.com</a> , Bank Dunia	Tahunan: 2007 sampai 2020
11	<i>Urban Population</i>	UP	<a href="https://www.theglobaleconomy.com">https://www.theglobaleconomy.com</a> , Bank Dunia	Tahunan: 2007 sampai 2020
12	<i>Rural Population</i>	RP	<a href="https://www.theglobaleconomy.com">https://www.theglobaleconomy.com</a> , Bank Dunia	Tahunan: 2007

---

---

### Identifikasi Variabel

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan statistik parametrik yaitu dengan metode dan model SFA sebagai alat uji dan alat analisis untuk mengukur tingkat efisiensi pariwisata dengan variabel yang digunakan terdiri dari jumlah kunjungan wisatawan (*International Tourist Arrivals*), *Rule of Law*, *Government Effectiveness*, *Political Stability*, *Political Rights*, *Civil Liberties*, *Regulatory Quality*, *Short-Term Political Risk*, *Political Violence Risk*, *Population Size*, *Urban Population*, dan *Rural Population*.

### Definisi Operasional

a. Jumlah kunjungan wisatawan (*International Tourist Arrivals*)

Menurut *United Nation World Tourism Organization* (UNWTO) jumlah kunjungan wisatawan asing atau ITA merujuk secara eksklusif kepada wisatawan yang semalam (pengunjung ) contoh seorang pendatang yang tinggal paling tidak satu malam di tempat tujuan. Baik kunjungan dilakukan secara berkelompok maupun sendiri. Orang yang sama yang membuat beberapa perjalanan di suatu negara selama jangka waktu tertentu akan dianggap sebagai pendatang baru, serta orang melakukan perjalanan ke beberapa negara untuk sekali jalan juga dianggap sebagai pendatang baru.

b. *Rule of Law*

Supremasi hukum adalah bagian penting dalam keamanan dan perdamaian internasional dan stabilitas politik untuk mencapai kemajuan dan pengembangan ekonomi dan sosial; serta untuk melindungi hak-hak masyarakat dan kebebasan fundamental. Hal tersebut sebagai pondasi akses kepada layanan publik, menggelar razia, korupsi menahan penyalahgunaan kekuasaan, dan untuk pendirian kontrak sosial di antara manusia dan negara. Supremasi hukum dan perkembangannya menjadi supremasi *law-based* masyarakat yang harus dianggap sebagai sebuah hasil dari agenda 2030 dan tujuan tujuan dari pembangunan berkelanjutan (SDGs). Dimana memiliki nilai indeks tertinggi 2,5 atau sangat kuat dan -2,5 untuk indeks terendah atau sangat lemah.

c. *Government Effectiveness*

Indeks Efektivitas pemerintah adalah indeks yang diuraikan oleh kelompok bank dunia yang mengukur kualitas pelayanan publik, pelayanan sipil, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan kredibilitas dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas atau menjaga kualitas pelayanan tetap tinggi. Indeks ini memasukkan 193 negara yang diperingkat dari nilai -2.5 (kurang efektif) sampai 2.5 (sangat efektif). Indikator ini merupakan salah satu indikator penilaian kualitas pemerintah. Dimana memiliki nilai indeks tertinggi 2,5 atau sangat kuat dan -2,5 untuk indeks terendah atau sangat lemah.

d. *Political Stability*

Variabel yang sangat penting di negara yang mengalami evolusi di seluruh waktu. Variabel ini diidentifikasi sebagai hukum yang menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi, tetapi disajikan sebagai konsekuensi dari pembangunan ekonomi miskin. Dimana memiliki nilai indeks tertinggi 2,5 atau sangat kuat dan -2,5 untuk indeks terendah atau sangat lemah

e. *Political Rights*

Hak politik didefinisikan sebagai hak-hak politik yang didalamnya termasuk keadilan alami (keadilan prosedural) dalam hukum seperti hak-hak terdakwa, termasuk hak untuk sebuah pengadilan yang adil; proses keadilan; hak untuk mencari ganti rugi atau upaya hukum; dan hak-hak partisipasi dalam masyarakat sipil dan politik seperti memperoleh kebebasan dasar, hak untuk berkumpul, hak untuk petisi, hak pertahanan diri, dan hak untuk memilih. Dimana memiliki nilai indeks tertinggi 1 atau sangat kuat dan 7 untuk indeks terendah atau sangat lemah.

f. *Civil Liberties*

Kebebasan sipil adalah garansi maupun kebebasan liberal yang tidak dibatasi pemerintah, baik dibatasi oleh undang-undang atau interpretasi pengadilan, tanpa melalui proses. kebebasan sipil mungkin termasuk kebebasan hati nurani, kebebasan pers, kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, hak untuk keamanan dan kebebasan, kebebasan berbicara, hak untuk privasi, hak memperoleh perlakuan yang sama di bawah hukum dan proses, hak untuk pengadilan yang adil, dan hak untuk hidup. Kebebasan sipil lainnya adalah hak untuk harta, hak untuk membela diri, dan hak untuk integritas tubuh. Dimana memiliki nilai indeks tertinggi 2,5 atau sangat kuat dan -2,5 untuk indeks terendah atau sangat lemah.

g. *Regulatory Quality*

Kualitas regulator adalah sesuatu yang berkaitan dengan pengaturan kualitas dengan cara menangkap persepsi terhadap kemampuan pemerintah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan izin peraturan dan mendorong pengembangan sektor swasta. Dimana memiliki nilai indeks tertinggi 2,5 atau sangat kuat dan -2,5 untuk indeks terendah atau sangat lemah.

h. *Short-Term Political Risk*

Resiko politik jangka pendek adalah klasifikasi untuk mengukur kemungkinan resiko yang disebabkan oleh politik dan peristiwa berasimilasi yang terhubung dengan transaksi antar negara dengan risiko masyarakat sampai maksimal 1 tahun. Dimana memiliki nilai indeks tertinggi 2,5 atau sangat kuat dan -2,5 untuk indeks terendah atau sangat lemah

i. *Political Violence Risk*

Kekerasan politik mencakup semua tindakan kekerasan yang dilakukan dengan tujuan politik; konsep ini memiliki cakupan lebih luas daripada perang

dan terorisme (agama, politik, dan tujuan ideologi dan kerusakan akibat kekerasan politik (kerusakan atas aset kekayaan hasil aksi kekerasan politik). Tujuan dari resiko ini untuk menganalisis risiko kekerasan politik jenis bisnis gangguan sebagai akibat dari kerusuhan politik yang terjadi. Dimana memiliki nilai indeks tertinggi 2,5 atau sangat kuat dan -2,5 untuk indeks terendah atau sangat lemah.

j. *Population Size*

Jumlah penduduk didasarkan pada data secara de facto dari definisi penduduk, yang dihitung berdasarkan keseluruhan warga terlepas dari status hukum atau kewarganegaraan (Bank Dunia).

k. *Urban Population*

Populasi perkotaan merujuk kepada orang-orang yang tinggal di perkotaan seperti yang didefinisikan oleh Badan Statistik.

l. *Rural Population*

Populasi desa merujuk kepada orang-orang yang tinggal di wilayah perdesaan seperti yang didefinisikan oleh statistik nasional

### **Metodologi**

Karna di dalam penelitian ini ingin mengidentifikasi dan mendeteksi efisiensi pada pariwisata yang disebabkan oleh faktor sosial politik, maka akan menggunakan metode SFA (*Stochastic Frontier Analysis*) sebagai pendekatan dan model statistik dalam mengestimasi hal tersebut.

a. **Mengenal Metode SFA**

*Stochastic Frontier Analysis* (SFA) merupakan salah satu metode parametrik untuk mengukur nilai efisiensi. Pengertian lain SFA adalah sebuah teknik analisis statistik yang digunakan untuk memperkirakan fungsi atau biaya produksi dalam suatu perekonomian dengan mempertimbangkan inefisiensi perusahaan. Menurut (Coelli, 2005) dalam pengukuran efisiensi dengan metode SFA dapat menggunakan dua jenis fungsi, yaitu fungsi produksi dan fungsi biaya. Untuk mengukur efisiensi fungsi produksi dapat diukur dengan memperhitungkan tingkat output maksimum yang dapat dicapai oleh kombinasi sejumlah input tertentu. Sementara itu, fungsi efisiensi biaya diukur berdasarkan tingkat biaya minimum yang dapat dicapai perusahaan dengan tingkat output tertentu. Efisiensi teknis pada metode SFA mengacu pada kemampuan menghasilkan output optimal oleh input tertentu (berorientasi output) atau kemampuan menggunakan input minimum untuk mendapatkan output tertentu (berorientasi input) (Tahir et al., 2008). Aigner dan Chu (1968) memformulasikan metode *Stochastic Frontier Analysis* (SFA) dengan menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\ln Y = \ln \beta_0 + \beta_1 \ln X_1 + \dots + (v_i - u_i) \quad 1)$$

Y adalah variabel dependen = variabel output  
X adalah variabel independen = variabel input

Dimana:

q adalah output dari perusahaan,

$x_i$  adalah input perusahaan.

$\beta$  adalah vektor dari parameter yang tidak diketahui, dan merupakan variabel acak non-negatif yang terkait dengan teknis ketidakefisienan

$u_i$  adalah *error term*

Secara umum persamaan SFA menurut Battese & Coelli (1992) dengan menerapkan persamaan berikut ini:

$$Y_{it} = f(X_{it}, \beta) + (V_{it} - U_{it}) \quad i = 1, 2, \dots, N; t = 1, 2, \dots, T \quad 2)$$

Dimana:

i = entitas/unit

t = waktu

$Y_{it}$  adalah variabel output dalam penelitian ini adalah jumlah kunjungan wisatawan internasional (ITA) negara i selama periode t

$X_{it}$  adalah vektor yang menunjukkan fungsi input untuk negara i selama periode t. input didalam penelitian ini meliputi; *Rule of Law, Government Effectiveness, Political Stability, Political Rights, Civil Liberties, Regulatory Quality, Short-Term Political Risk, Political Violence Risk, Population Size, Urban Population, dan Rural Population*

$V_{it} - U_{it} = \varepsilon_{it}$  = *error term*

$U_{it}$ , inefisiensi teknis yaitu faktor acak yang dapat dikendalikan, adalah kesalahan acak dari faktor-faktor yang tidak dapat dijelaskan oleh data.

$V_{it}$ , *noise* statistik adalah factor acak yang tidak dapat dikendalikan

$V_{it}$  dan  $U_i$  diasumsikan terdistribusi normal, independen, dan acak

$\beta$  adalah parameter yang tidak teridentifikasi vektor, dianggap independen dan identik, distribusinya acak dan memiliki distribusi normal dan independeni

Nilai efisiensi metode SFA memiliki nilai antar 0 sampai 1. Dikatakan efisien apabila nilai efisiensi mendekati 1, dan tidak efisien apabila nilai efisiensi mendekati 0.

Keunggulan metode SFA yaitu memiliki bentuk fungsional hubungan produksi antara input dan output yang spesifik sehingga membuat hasil turunan lebih akurat. Selain itu, perbedaan SFA dengan metode pengukuran efisiensi yang lain persamaan pembentuknya seperti model regresi ekonometri yaitu terdiri dari 1 variabel dependent dan banyak variabel independen. Dengan kata lain terdiri dari satu output dengan banyak input. Model SFA termasuk pemrograman linier yang digunakan untuk mengukur level kinerja efisiensi sebuah organisasi dengan menggunakan DMU. *Decision Making Unit* (DMU) adalah entitas yang menggunakan input untuk menghasilkan output (Hassan,

2018). Hal yang dianggap penting untuk pemilihan DMU dan variabel input output dalam mengukur efisiensi adalah variabel input atau output berhubungan positif, variabel input dan output harus memiliki hubungan isotonisitas, yang berarti bahwa dalam setiap peningkatan dalam variabel input harus menghasilkan peningkatan setidaknya satu variabel output dan tidak ada variabel output mengalami penurunan. Arena di dalam persamaan SFA harus menentukan variabel output dan input, maka Tabel 2 ditunjukkan pembagian variabel berdasarkan kriteria metode SFA.

**Tabel 2**  
**Variabel Output dan Input**

Nama Variabel	Akronim	Input atau Output	Satuan
Jumlah kunjungan wisatawan ( <i>International Tourist Arrivals</i> )	ITA	Output	Juta jiwa
<i>Rule of Law</i>	RL	Input	Index
<i>Government Effectiveness</i>	GE	Input	Indeks
<i>Political Stability</i>	PS	Input	Indeks
<i>Political Rights</i>	PR	Input	Indeks
<i>Civil Liberties</i>	CL	Input	Indeks
<i>Regulatory Quality</i>	RQ	Input	Indeks
<i>Short-Term Political Risk</i>	SPR	Input	Indeks
<i>Political Violence Risk</i>	PVR	Input	Indeks
<i>Population Size</i>	PZ	Input	Juta jiwa
<i>Urban Population</i>	UP	Input	Juta Jiwa
<i>Rural Population</i>	RP	Input	Juta Jiwa

#### **b. Hipotesis Metode SFA**

Dugaan sementara atau hipotesis dari penelitian ini dengan menggunakan metode SFA adalah sebagai berikut:

H0 = tidak terdapat pengaruh antara komponen input dan output terhadap efisiensi pariwisata di ASEAN

H1 = terdapat pengaruh antara komponen input dan output terhadap efisiensi pariwisata di ASEAN

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Di dalam penelitian ini menggunakan data panel sebagai data penelitian. Data penelitian ini diolah dengan menggunakan STATA 15. Berikut beberapa hasil olah data penelitian ini.



#### a. Statistik Deskriptif

Berdasarkan Tabel 3 tentang statistik deskriptif diketahui bahwa rata-rata jumlah wisatawan internasional (ITA) yang berkunjung ke ASEAN sebesar 60 juta jiwa per tahun. Untuk rata-rata indeks *rule of Law* (RL) atau supremasi hukum per tahun sebesar 0,07. Hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya penegakan hukum yang telah dilaksanakan oleh negara-negara ASEAN memiliki kecenderungan cukup baik. Hal ini dikarenakan perubahan iklim politik yang kemungkinan disebabkan oleh iklim ekonomi yang lebih baik di kawasan ASEAN. Efektivitas pemerintah (GE) memiliki nilai rata-rata indeks sebesar -0,02. Ini menunjukkan bahwa efektifitas pemerintah negara-negara ASEAN dalam memberikan pelayanan dan kebijakan publik memiliki kecenderungan tingkat efektivitas yang masih lemah. Berbicara tentang stabilitas politik (PS) di ASEAN memiliki kecenderungan yang cukup stabil dibuktikan dengan rata-rata indeks sebesar 0,07. Stabilitas politik di ASEAN yang memiliki kecenderungan cukup stabil menunjukkan bahwa manajemen atau tatakelola pemerintahan negara-negara ASEAN cukup baik.

Sementara itu kebebasan sipil (CL) memiliki nilai indeks rata-rata sebesar 4,56. Nilai ini menunjukkan bahwa kebebasan sipil di ASEAN masih lemah dan perlu mendapatkan perhatian yang baik untuk menumbuhkan iklim kebebasan sipil yang lebih demokratis, sehingga dapat tercipta stabilitas politik. Hak-hak politik (PR) di ASEAN memiliki rata-rata indeks sebesar 5,04 atau lemah. Hak-hak politik warganegara yang lemah ini menunjukkan bahwa belum secara menyeluruh sistem demokrasi mampu memberikan hak-hak politik dari warganegara dan masih didominasi oleh peran pemerintah yang dominan dan mengatur. Kualitas Regulator (RQ) menunjukkan rata-rata indeks sebesar 0,02 atau cukup kuat. Menunjukkan implementasi dari kebijakan pemerintah mampu dikelola dengan baik untuk membantu sektor swasta.

Resiko politik dalam jangka pendek (SPR) di ASEAN rendah yaitu memiliki rata-rata indeks sebesar 2,5. Membuktikan bahwa ASEAN kondisi politik ASEAN dalam ASEAN memiliki kecenderungan lebih stabil. Hampir sama dengan resiko politik jangka pendek, untuk resiko kekerasan politik (PVR) di ASEAN memiliki rata-rata indeks yang rendah yaitu 2,8. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa resiko politik di ASEAN memiliki kecenderungan lebih bisa diminimalisir dibandingkan dengan aturan atau regulasi yang dibuat oleh pemerintah yang cenderung banyak penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Untuk rata-rata populasi (PZ) di ASEAN sebesar 101,4 juta jiwa. Sedangkan rata-rata penduduk kota (UP) dan desa (RP) di ASEAN masing-masing 50,5 juta jiwa dan 48,8 juta jiwa. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil uraian di atas adalah bahwa kelemahan di ASEAN yaitu penegakan dari segi politik yaitu aturan atau hukum dan implementasi kebijakan atau regulasi pemerintah yang masih memiliki kecenderungan belum stabil dan lemah. Hal ini disebabkan kemungkinan besar oleh kondisi dari sistem pemerintahan dan ideologi yang dianut oleh masing-masing negara ASEAN yang berbeda-beda dengan karakteristik masyarakat yang berbeda-beda pula. Namun memiliki kecenderungan resiko politik cenderung dapat dikendalikan.

**Tabel 3**  
**Statistik Deskriptif**

Variable	Obs	Rata-rata	Std. Dev.
ITA	121	60.06612	34,20398
RL	140	0,069169	0,895051
GE	140	-0,01691	0,894239
PS	140	0,074792	0,896651
PR	131	5,038168	1,684338
CL	131	4,564885	0,993047
RQ	140	0,026718	0,879248
SPR	61	2,52459	1,699084
PVR	61	2,803279	1,222288
PZ	131	101400,2	122552
UP	131	50,49652	24,08116
RP	131	48,81936	24,11526

Data diolah dengan STATA 15

#### b. Uji Normalitas Data

Uji ini untuk melihat apakah data yang digunakan di dalam penelitian ini sudah terdistribusi secara normal atau tidak. Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa nilai probabilitas *Chi Square* untuk variabel ITA, RL, GE, PR, RQ, SPR, PZ, UP, dan RP kurang dari tingkat signifikansi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut belum terdistribusi normal. Hasil ini menunjukkan menerima hipotesa alternatif yaitu data tidak terdistribusi secara normal dan hipotesa nol untuk data terdistribusi normal ditolak. Akan tetapi, untuk variabel PS, PVR, dan CL sudah terdistribusi normal. Dengan kata lain, menerima hipotesa nol dan menolak hipotesa alternatif, yaitu datanya sudah terdistribusi normal. Yang dibuktikan oleh nilai probabilitas *Chi Square* lebih besar dari tingkat signifikansi 5%.

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Normalitas Data**

Variable	chi2(2)	Prob>chi2
ITA	33,07	0,000*
RL	17,72	0,000*
GE	14,79	0,001*
PS	0,53	0,768
PR	27,44	0,000*
CL	2,64	0,267*
RQ	11,93	0,003*
SPR	6,87	0,032*
PVR	0,18	0,914
PZ	29,38	0,000*
UP	9,56	0,008*
RP	11,44	0,003*

\*Signifikan pada tingkat signifikansi 5%; Data diolah dengan STATA 15

### c. Model *Stochastic Frontier Analysis* (SFA)

Untuk mengetahui ada besar kecilnya tingkat efisiensi dari pariwisata yang diukur dengan pendekatan variabel politik dan sosial, maka selanjutnya menggunakan model *Stochastic Frontier Analysis* (SFA). Berdasarkan hasil estimasi model SFA yang disajikan pada Tabel 5. Pada tabel tersebut menunjukkan model terbaik SFA dan menemukan bahwa secara keseluruhan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependennya. Hal ini terlihat dari nilai probabilitas *chi square* yang kurang dari tingkat signifikansi 5%. Hasil ini menunjukkan bahwa secara serentak variabel independen signifikan terhadap variabel independennya

Untuk uji signifikansi masing-masing variabel independen diperoleh hasil bahwa variabel RL, PZ, dan UP berpengaruh signifikan terhadap variabel ITA. Yang diperkuat oleh nilai probabilitas statistik z masing-masing 0,000; 0,020; dan 0,005 kurang dari tingkat signifikansi 5%. Berdasarkan hasil ini membuktikan variabel *Rule of law*, *Population size*, dan *urban population* mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke ASEAN. Hasil lain dari hasil estimasi SFA menunjukkan variabel PR dan SPR berpengaruh signifikan terhadap jumlah kunjungan wisatawan asing di ASEAN. Hasil ini diperkuat oleh nilai probabilitas statistik z masing-masing variabel tersebut yaitu 0,091 dan 0,097 lebih kecil dari tingkat signifikansi 10%. Kesimpulan yang bisa diambil adalah hak-hak politik dan kondisi politik dalam jangka pendek dapat mempengaruhi kunjungan wisatawan asing ke ASEAN.

Hasil lain dari tabel SFA menunjukkan jika supremasi hukum (RL) turun sebesar 1%, maka kunjungan wisatawan asing ke ASEAN turun sebesar 71%. Penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif memberikan dampak yang signifikan terhadap kepercayaan wisatawan asing. Karena dengan adanya hukum yang adil dan tidak diskriminatif menunjukkan daerah atau kawasan tersebut benar-benar mematuhi hukum dan menjalankan hukum sebagaimana mestinya sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip demokrasi. Apabila ada kenaikan indeks hak-hak politik sebesar 1%, maka akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan asing sebesar 6,12%. Hasil ini menunjukkan bahwa hak-hak politik warganegara domestic atau kawasan tertentu yang mengalami penurunan cenderung memberikan dampak positif terhadap jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke ASEAN. Hal ini kemungkinan besar dikarenakan bahwa hak-hak politik hanya diperuntukkan untuk warga negara domestic saja bukan untuk warga negara asing. Sehingga pengaruhnya tidak memiliki dampak terlalu besar terhadap wisatawan asing. Kondisi resiko politik dalam jangka pendek juga mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan. Apabila ada kenaikan resiko politik dalam jangka pendek sebesar 1%, maka akan menurunkan jumlah wisatawan asing sebesar 6,03%. Bukti ini menunjukkan bahwa kondisi politik dalam jangka pendek menjadi salah satu pertimbangan bagi wisatawan asing untuk berkunjung ke ASEAN. Karena akan menyangkut keamanan dan keselamatan wisatawan asing tersebut.

Untuk aspek sosial yang diwakili oleh populasi menunjukkan apabila ada kenaikan 1% populasi di ASEAN, maka akan menurunkan jumlah wisatawan asing sebesar 0,000104%. Dengan kata lain kenaikan pada populasi memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadap kunjungan wisatawan asing ke ASEAN. Sementara itu, kenaikan jumlah penduduk di kota sebesar 1% akan menaikkan jumlah wisatawan asing sebesar 1,1%. Penduduk yang tinggal di kota akan mencari cara untuk meningkatkan perekonomian mereka salah satunya dengan

membuat inovasi yang dapat mendatangkan wisatawan asing. Hal ini dikarenakan terdapat asumsi bahwa penduduk kota yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi akan menghasilkan inovasi dan kreatifitas yang tinggi, sehingga salah satunya dapat mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan asing.

**Tabel 5**  
**Hasil Estimasi Model Stochastic Frontier Analysis (SFA)**

Variabel	Coef.	Std. Err.	z-statistics	P>z
RL	-71,985	19,248	-3,740	0,000*
GE	25,145	22,578	1,110	0,265
PS	-6,434	7,359	-0,870	0,382
PR	6,119	3,622	1,690	0,091**
CL	-9,642	9,674	-1,000	0,319
RQ	7,599	16,899	0,450	0,653
SPR	-6,031	3,631	-1,660	0,097**
PVR	-2,411	5,429	-0,440	0,657
PZ	-0,000104	0,0000449	-2,320	0,020*
UP	1,098	0,389	2,820	0,005*
RP	0,403	0,436	0,920	0,355
Prob > chi2		=	0.0000	

\*signifikan pada level signifikansi 5%; \*\*signifikan pada level signifikansi 10%;

#### d. Technical Efficiency (TE)

Untuk mengetahui apakah variabel politik dan sosial memberikan efisiensi terhadap variabel wisata, maka Tabel 6 menunjukkan klasifikasi dari tingkat efisiensi. Sementara itu, Tabel 7 Menunjukkan hasil TE dari model SFA di atas. Berdasarkan table tersebut diketahui secara keseluruhan variabel penjelas atau independen variabel mempengaruhi tingkat inefisiensi pada sektor pariwisata di ASEAN. Nilai TE yang sangat kecil yaitu lebih dari 0,056 membuktikan bahwa aspek sosial dan khususnya politik yang tidak stabil memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap terjadinya inefisiensi pada sektor pariwisata di wilayah ASEAN.

**Tabel 6**  
**Klasifikasi Efisiensi Berdasarkan Technical Efficiency**

No	Nilai Technical Efficiency	Deskripsi
1	> 0,90	Sangat efisien
2	0,70 sampai 0,89	Cukup efisien
3	< 0,70	Tidak efisien

**Tabel 7**  
**Hasil TE Model SFA**

No	Nilai Technical Efficiency	Deskripsi
----	----------------------------	-----------

---

1	0 – 0,056	Tidak efisien atau inefisien
---	-----------	------------------------------

---

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Beberapa kesimpulan yang didapat dari penelitian ini antara lain:

1. Secara umum kondisi dan iklim politik di ASEAN masih memiliki kecenderungan belum stabil terutama untuk penegakan hukum, pemenuhan hak-hak politik, kebebasan sipil masih memiliki kecenderungan lemah dan belum stabil.
2. Uji normalitas menunjukkan bahwa sebagian besar data observasi belum terdistribusi secara normal.
3. Sebagian besar variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Hal ini membuktikan bahwa ada dampak yang signifikan dari variabel sosial dan politik terhadap pariwisata khususnya jumlah kunjungan wisatawan asing di ASEAN
4. Pengaruh aspek sosial dan politik terhadap kedatangan turis asing ke ASEAN membuktikan bahwa peranan sosial dan politik menjadi penting di era sekarang ini.
5. Ketidakstabilan politik dalam jangka pendek dan penegakan hukum yang lemah memberikan dampak baik langsung maupun tidak langsung kepada perkembangan pariwisata kawasan ASEAN.
6. Nilai efisiensi menunjukkan inefisiensi yang sangat tinggi. Hal ini membuktikan bahwa inefisiensi pariwisata juga banyak dipengaruhi oleh aspek politik dan sosial di kawasan ASEAN. Pengaruh stabilitas politik dan hukum akan mempengaruhi ketertarikan dan kunjungan wisatawan asing, karena mereka mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, dan pelayanan hukum yang baik selama berada di daerah tujuan wisata mereka.
7. Pentingnya efisiensi pada sektor pariwisata untuk meningkatkan pertumbuhan pariwisata dan mendorong perekonomian di kawasan ASEAN, sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN.

### **Saran**

Beberapa saran dari penelitian ini antara lain:

- a. Perlu memperbanyak data yang sifatnya tahunan. Hal ini dikarenakan banyak variabel yang memiliki data kurang lengkap pada tahun-tahun tertentu
- b. Keberlanjutan penelitian ini sangat diperlukan. Hal ini bertujuan untuk memberikan bukti bahwa keterlibatan bidang sosial dan bidang politik pada pariwisata memiliki pengaruh yang signifikan
- c. Perlu mengaitkan bidang sosial dan bidang politik dengan wisata halal. Yang mana akhir-akhir ini wisata halal menjadi primadona di dunia
- d. Memperbanyak variabel sosial selain yang terdapat di dalam penelitian ini
- e. Memperdalam teori dan fakta keterkaitan sosial dan politik terhadap efisiensi dan produktivitas pariwisata.
- f. Menambah negara amatan

## DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, V., Mizrahi, R., & Orly, O. (2020). Exploring the antecedents and consequences of political animosity: the case of millennial female tourists traveling to India. *Current Issues in Tourism*, 0(0), 1–18. <https://doi.org/10.1080/13683500.2020.1767043>
- Abraham, V., & Poria, Y. (2019). Political identification, animosity, and consequences on tourist attitudes and behaviours. *Current Issues in Tourism*, 0(0), 1–18. <https://doi.org/10.1080/13683500.2019.1679095>
- Agustina, D., M. Sholihin, and A. Fithria. (2019). "The Efficiency of Indonesian Islamic Rural Banks: A Stochastic Frontier Analysis," *Int. J. Islam. Econ. Financ.*, vol. 1, no. 2, pp. 229–248, 2019, doi: 10.18196/ijef.1212.
- Akama, J. S. (2002). The role of Government in the development of tourism in Kenya. *International Journal of Tourism Research*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.1002/jtr.318.abs>
- Alola, U. V., Cop, S., & Adewale Alola, A. (2019). The spillover effects of tourism receipts, political risk, real exchange rate, and trade indicators in Turkey. *International Journal of Tourism Research*, 21(6), 813–823. <https://doi.org/10.1002/jtr.2307>
- Álvarez-Díaz, M., González-Gómez, M., & Otero-Giráldez, M. S. (2019). Estimating the effects of regional political climate on Russian tourists to Spain. *Current Issues in Tourism*, 22(4), 409–414. <https://doi.org/10.1080/13683500.2017.1372394>
- Athari, S. A., Alola, U. V., Ghasemi, M., & Alola, A. A. (2020). The (Un)sticky role of exchange and inflation rate in tourism development: insight from the low and high political risk destinations. *Current Issues in Tourism*, 0(0), 1–16. <https://doi.org/10.1080/13683500.2020.1798893>
- Avral, D., & Bălan, A. M. (2015). Innovative Methods in the Development of Rural Tourism in Romania. *Junior Scientific Researcher*, 1(1), 33–41.
- Bate, G. C., & Taylor, R. H. (2019). The effects of tourism, economic development and population growth on a small rural area of South Africa. *Transactions of the Royal Society of South Africa*, 74(2), 189–201. <https://doi.org/10.1080/0035919X.2019.1608476>
- Bianchi, R. V., Stephenson, M. L., & Hannam, K. (2020). The contradictory politics of the right to travel: mobilities, borders & tourism. *Mobilities*, 15(2), 290–306. <https://doi.org/10.1080/17450101.2020.1723251>
- Blackstock, K. (2005). A critical look at community based tourism. *Community Development Journal*, 40(1), 39–49. <https://doi.org/10.1093/cdj/bsi005>
- Brown, G. (2006). Mapping Landscape Values and. *Tourism*, 113(November 2012), 101–113. <https://doi.org/10.1002/jtr>
- Cantallops, A. S. (2004). Policies supporting sustainable tourism development in the Balearic Islands: The Ecotax. *Anatolia*, 15(1), 39–56. <https://doi.org/10.1080/13032917.2004.9687143>
- Cao, X. (2015). Challenges and potential improvements in the policy and regulatory framework for sustainable tourism planning in China: the case of Shanxi Province. *Journal of Sustainable Tourism*, 23(3), 455–476. <https://doi.org/10.1080/09669582.2014.957207>
- Clancy, M. (2020). Tourism, financialization, and short-term rentals: the political economy of Dublin's housing crisis. *Current Issues in Tourism*, 0(0), 1–18. <https://doi.org/10.1080/13683500.2020.1786027>
- Cooper, M., & Flehr, M. (2006). Government intervention in tourism development:

- Case studies from Japan and South Australia. *Current Issues in Tourism*, 9(1), 69–85. <https://doi.org/10.1080/13683500608668239>
- Cristina Domareski-Ruiz, T., Fumi Chim-Miki, A., Añaña, E., & Antonio dos Anjos, F. (2020). Impacts of mega-events on destination competitiveness and corruption perception in South American countries. *Tourism & Management Studies*, 16(2), 7–15. <https://doi.org/10.18089/tms.2020.160201>
- Czernek, K. (2017). Tourism features as determinants of knowledge transfer in the process of tourist cooperation. *Current Issues in Tourism*, 20(2), 204–220. <https://doi.org/10.1080/13683500.2014.944107>
- Demir, E., & Gozgor, G. (2019). Does freedom of the press enhance inbound tourism? *Current Issues in Tourism*, 22(20), 2550–2565. <https://doi.org/10.1080/13683500.2018.1470608>
- Duffy, L. N., Pinckney, H. P., Benjamin, S., & Mowatt, R. (2019). A critical discourse analysis of racial violence in South Carolina, U.S.A.: implications for traveling while Black. *Current Issues in Tourism*, 22(19), 2430–2446. <https://doi.org/10.1080/13683500.2018.1494143>
- Duque, P. L., Arrivillaga-Henríquez, J., Enríquez, S., Ron-Garrido, L., Benítez, W., & Navarro, J.-C. (2020). Spatial-Temporal Analysis of *Lutzomyia trapidoi* and *Lutzomyia reburra* (Diptera: Phlebotominae), in Rural Tourist Locations, Biosphere Reserve and Leishmaniasis Endemic Area, Ecuador. *Journal of Medical Entomology*, X, 1–8. <https://doi.org/10.1093/jme/tjaa102>
- Eni, Y, L. T. Enjelia, J. M. Putri, and F. N. Sari, “The Efficiency of Rice Production Analysis in The Western Part of Indonesia By Using Stochastic Frontier Analysis Method ( SFA ),” vol. 29, no. 5, pp. 6154–6165, 2020.
- Fielding, D., & Shortland, A. (2011). How do tourists react to political violence? An empirical analysis of tourism in Egypt. *Defence and Peace Economics*, 22(2), 217–243. <https://doi.org/10.1080/10242694.2011.542340>
- Fletcher, J., & Morakabati, Y. (2008). Tourism activity, terrorism and political instability within the Commonwealth: The cases of Fiji and Kenya. *International Journal of Tourism Research*, 10(6), 537–556. <https://doi.org/10.1002/jtr.699>
- Frenč, C. (2018). Informing tourism policy with statistical data: the case of the Icelandic Tourism Satellite Account†. *Current Issues in Tourism*, 21(9), 1033–1051. <https://doi.org/10.1080/13683500.2015.1126237>
- Garcia-Olaya, D. L. C. (2014). Farm tourism a possible resource for the rural population (Spain). *Tourism Recreation Research*, 16(1), 83–84. <https://doi.org/10.1080/02508281.1991.11014613>
- Hadhek, Z, M. Frifita, and M. Lafi, “The Determinants of Profit Efficiency of Islamic Banks Using Stochastic Frontier Analysis Approach,” *Int. J. Econ. Financ. Issues*, vol. 8, no. 6, pp. 20–29, 2018, doi: 10.32479/ijefi.6996.
- Harvey, D. (1989). From Managerialism to Entrepreneurialism: The Transformation in Urban Governance in Late Capitalism. *Geografiska Annaler: Series B, Human Geography*, 71(1), 3–17. <https://doi.org/10.1080/04353684.1989.11879583>
- Henderson, J. C. (2003). The politics of tourism in Myanmar. *Current Issues in Tourism*, 6(2), 97–118. <https://doi.org/10.1080/13683500308667947>
- In, S., Field, T. H. E., & Adr, O. F. (1996). Training Quality ( or Lack of. *Conflict*, 23(2), 185–202. <https://doi.org/10.1002/crq>
- J, Saifulsyahira., Farhan, R. Mohammad., Juni, H. M. (2016). Assessing efficiency of primary care services: methodological issues. *International*

- Journal of Public Health and Clinical Sciences*, 3(4), 30–51.
- Jones, P. J. S. (2019). A governance analysis of Ningaloo and Shark Bay Marine Parks, Western Australia: Putting the 'eco' in tourism to build resilience but threatened in long-term by climate change? *Marine Policy*, July, 103636. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.103636>
- Jørgensen, M. T., King, B. E., & Law, R. (2020). The impacts of China's policy-making and legislation on outbound tourism—perspectives from long-haul intermediaries. *Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events*, 12(1), 21–33. <https://doi.org/10.1080/19407963.2018.1505104>
- Katharakis, G, M. Katharaki, and T. Katostaras, "An empirical study of comparing DEA and SFA methods to measure hospital units' efficiency," *Int. J. Oper. Res.*, vol. 21, no. 3, pp. 341–364, 2014, doi: 10.1504/IJOR.2014.065413.
- Keyim, P. (2016). Tourism and rural development in western China: A case from Turpan. *Community Development Journal*, 51(4), 534–551. <https://doi.org/10.1093/cdj/bsv046>
- Khan, H. U. R., Zaman, K., Shoukry, A. M., Sharkawy, M. A., Gani, S., Sasmoko, Ahmad, J., Rameli, M. R. M., & Hishan, S. S. (2019). Tourism logistics management through financial and regulatory measures: evidence from a panel of countries. *Asia Pacific Journal of Tourism Research*, 24(5), 443–458. <https://doi.org/10.1080/10941665.2019.1588760>
- King, S. A., & Gatchet, R. D. (2017). Marking the past: Civil rights tourism and the Mississippi freedom trail. *Southern Communication Journal*, 83(2), 103–118. <https://doi.org/10.1080/1041794X.2017.1404124>
- Kozić, I., Sorić, P., & Sever, I. (2020). Contextual factors influencing tourism-led growth: do social and political background matter? *Current Issues in Tourism*, 0(0), 1–11. <https://doi.org/10.1080/13683500.2020.1778648>
- Kubickova, M., & Li, H. (2017). Tourism Competitiveness, Government and Tourism Area Life Cycle (TALC) Model: The Evaluation of Costa Rica, Guatemala and Honduras. *International Journal of Tourism Research*, 19(2), 223–234. <https://doi.org/10.1002/jtr.2105>
- Kubickova, M., & Campbell, J. M. (2020). The role of government in agro-tourism development: a top-down bottom-up approach. *Current Issues in Tourism*, 23(5), 587–604. <https://doi.org/10.1080/13683500.2018.1551338>
- Larson, M. (2002). A political approach to relationship marketing: case study of the Storsjöyran festival. *International Journal of Tourism Research*, 4(2), 119–143. <https://doi.org/10.1002/jtr.366>
- Li, G., Law, R., Rong, J., & Vu, H. Q. (2010). Incorporating both positive and negative association rules into the analysis of outbound tourism in Hong Kong. *Journal of Travel and Tourism Marketing*, 27(8), 812–828. <https://doi.org/10.1080/10548408.2010.527248>
- Light, D., Crețan, R., & Dunca, A. M. (2020). Transitional justice and the political 'work' of domestic tourism. *Current Issues in Tourism*, 0(0), 1–13. <https://doi.org/10.1080/13683500.2020.1763268>
- Liu, C. H., & Huang, Y. C. (2019). An integrated structural model examining the relationships between natural capital, tourism image and risk impact and behavioural intention. *Current Issues in Tourism*, 0(0), 1–18. <https://doi.org/10.1080/13683500.2019.1620187>
- Litvin, S. W., & Smith, W. W. (2020). International travel and political views. *International Journal of Tourism Research*, June, 1–4. <https://doi.org/10.1002/jtr.2397>
-



- Lv, Z., & Xu, T. (2017). A panel data quantile regression analysis of the impact of corruption on tourism. *Current Issues in Tourism*, 20(6), 603–616. <https://doi.org/10.1080/13683500.2016.1209164>
- Ma, E., Qu, C., Hsiao, A., & Jin, X. (2015). Impacts of China Tourism Law on Chinese Outbound Travelers and Stakeholders: An Exploratory Discussion. *Journal of China Tourism Research*, 11(3), 229–237. <https://doi.org/10.1080/19388160.2015.1077182>
- Mei, X. Y., Arcodia, C., & Ruhanen, L. (2015). The national government as the facilitator of tourism innovation: evidence from Norway. *Current Issues in Tourism*, 18(12), 1172–1191. <https://doi.org/10.1080/13683500.2013.822477>
- Misener, L., & Mason, D. S. (2006). Developing local citizenship through sporting events: Balancing community involvement and tourism development. *Current Issues in Tourism*, 9(4–5), 384–398. <https://doi.org/10.2167/cit263.0>
- Nasution, Z. (2020). Profit efficiency development of Islamic Banking using the stochastic frontier approach. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 6(1), 55–63. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol6.iss1.art6>
- Novy, J., & Colomb, C. (2019). Urban Tourism as a Source of Contention and Social Mobilisations: A Critical Review. *Tourism Planning and Development*, 0(0), 1–18. <https://doi.org/10.1080/21568316.2019.1577293>
- Olya, H. G. T., Shahmirzdi, E. K., & Alipour, H. (2019). Pro-tourism and anti-tourism community groups at a world heritage site in Turkey. *Current Issues in Tourism*, 22(7), 763–785. <https://doi.org/10.1080/13683500.2017.1329281>
- Prayag, G., & Hosany, S. (2015). Human resource development in the hotel industry of Mauritius: myth or reality? *Current Issues in Tourism*, 18(3), 249–266. <https://doi.org/10.1080/13683500.2013.787051>
- Qin, Q., Wall, G., & Liu, X. (2011). Government Roles in Stimulating Tourism Development: A Case from Guangxi, China. *Asia Pacific Journal of Tourism Research*, 16(5), 471–487. <https://doi.org/10.1080/10941665.2011.597573>
- Ramadilli Mohd, S., Hassan, T., & Bader, M. (2008). Efficiency of conventional versus Islamic banks: international evidence using the stochastic frontier approach (SFA). *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 4(2), 107–130.
- Romdhane, S. Ben. (2013). Impact of information technology on the performance of Tunisian banks: A stochastic frontier analysis with panel data. *Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance*, 9(2), 95–125.
- Ruhanen, L. (2013). Local government: Facilitator or inhibitor of sustainable tourism development? *Journal of Sustainable Tourism*, 21(1), 80–98. <https://doi.org/10.1080/09669582.2012.680463>
- Salama, H. H. (2015). Dubai: An Urbanism Shaped for Global Tourism. *Journal of Architectural Engineering Technology*, 04(03). <https://doi.org/10.4172/2168-9717.1000154>
- Seyfi, S., & Hall, C. M. (2020). Political transitions and transition events in a tourism destination. *International Journal of Tourism Research*, 22(4), 493–506. <https://doi.org/10.1002/jtr.2351>
- Shim, W.-S., & Lee, Y.-T. (2003). Residents' Perceptions of Government Involvement Impact and Their Attitudes towards Government Driven Tourism Development. *International Journal of Tourism Sciences*, 3(2), 133–150. <https://doi.org/10.1080/15980634.2003.11434554>

- Steiner, C. (2010). An overestimated relationship? Violent political unrest and tourism foreign direct investment in the Middle East. *International Journal of Tourism Research*, 12(6), 726–738. <https://doi.org/10.1002/jtr.788>
- Strambach, S., & Surmeier, A. (2013). Knowledge dynamics in setting sustainable standards in tourism – the case of ‘Fair Trade in Tourism South Africa.’ *Current Issues in Tourism*, 16(7–8), 736–752. <https://doi.org/10.1080/13683500.2013.785485>
- Suntikul, W., Butler, R., & Airey, D. (2008). A periodization of the development of Vietnam’s tourism accommodation since the open door policy. *Asia Pacific Journal of Tourism Research*, 13(1), 67–80. <https://doi.org/10.1080/10941660701883375>
- Tan, X., Chen, Z., Guan, B., Yang, C., & Wu, G. (2017). Game theory analysis of protection of tourist consumers’ rights and interests at lawsuit angle. *Journal of Discrete Mathematical Sciences and Cryptography*, 20(4), 885–897. <https://doi.org/10.1080/09720529.2017.1358868>
- Tchetchik, A., Fleischer, A., & Finkelshtain, I. (2008). Differentiation and synergies in rural tourism: Estimation and simulation of the Israeli market. *American Journal of Agricultural Economics*, 90(2), 553–570. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8276.2007.01112.x>
- Thieme, J., Hampton, M. P., Stoian, C., & Zigan, K. (2020). The political economy of backpacker tourism: explorations of tourism actors’ embeddedness in Colombia. *Current Issues in Tourism*, 0(0), 1–26. <https://doi.org/10.1080/13683500.2020.1806793>
- Tunney, J. (2010). World trade law, culture, heritage and tourism. Towards a holistic conceptual approach? *Current Issues in Tourism*, 7(4–5), 383–398. <https://doi.org/10.1080/13683500408667992>
- Ulubaşoğlu, M. A., & Hazari, B. R. (2004). Zipf’s law strikes again: The case of tourism. *Journal of Economic Geography*, 4(4), 459–472. <https://doi.org/10.1093/jnlcgl/bh030>
- Wang, C., Xu, H., Li, G., & Chen, J. L. (2018). Community social responsibility and the performance of small tourism enterprises: Moderating effects of entrepreneurs’ demographics. *International Journal of Tourism Research*, 20(6), 685–697. <https://doi.org/10.1002/jtr.2216>
- Wang, W. F., Chang, Y., & Pearce, P. L. (2018). China’s first Tourism Law: representations of stakeholders’ responses. *Journal of Tourism and Cultural Change*, 16(3), 309–327. <https://doi.org/10.1080/14766825.2017.1298607>
- Zeppel, H. (2012). Collaborative governance for low-carbon tourism: Climate change initiatives by Australian tourism agencies. *Current Issues in Tourism*, 15(7), 603–626. <https://doi.org/10.1080/13683500.2011.615913>
- Zou, Y., & Meng, F. (2020). Chinese tourists’ sense of safety: perceptions of expected and experienced destination safety. *Current Issues in Tourism*, 23(15), 1886–1899. <https://doi.org/10.1080/13683500.2019.1681382>
-